

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BANGKA

**Hattami Amar, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Pahlawan 12,
hattami_amr@yahoo.com**

**Anthony Lee Mega Satria, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Pahlawan 12,
anthonyleemegasatria@gmail.com**

Abstract

This study aimed to observe the effect of spending on education, health, and economic affairs on the Human Development Index in Bangka Regency from 2010-2019. This type of research is quantitative associative by using secondary data collection methods. The research location is in the area of Bangka Regency, the method of data analysis is multiple linear regression. The feasibility of multiple linear regression was tested with the classical assumption test, the simultaneous significance test with the F test and partially with the t test. The results of the research partially show that spending on education, health and economic affairs has a positive effect but the effect is not significant on the Human Development Index in Bangka Regency. Simultaneously, spending on education, health and economic affairs has a positive and significant effect on the Human Development Index in Bangka Regency, the amount of influence is around 92.6 percent and the remaining 7.4 percent is influenced by other variables not included in this study. The multiple regression equation, $Y = 65,692 + 0.000X_1 + 0.022X_2 + 0.042X_3$, which can be useful for predicting changes in the Human Development Index numbers through targeted business expenditure planning refers to the regression coefficient value.

Keywords: *Spending Education, health, economy, Human Development Index*

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari belanja urusan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka dari tahun 2010-2019. Jenis penelitian kuantitatif asosiatif, menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kabupaten Bangka, metode analisis data regresi linear berganda. Kelayakan regresi linear berganda diuji dengan uji asumsi klasik, uji signifikansi secara simultan dengan Uji F dan secara parsial dengan uji t. Hasil penelitian secara parsial, belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka. Secara simultan belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka, besaran pengaruhnya sekitar 92,6 persen dan sisanya 7,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini. Persamaan Regresi berganda, $Y=65,692+0,000X_1+0,022X_2+0,042X_3$, yang bisa berguna untuk memprediksi perubahan angka Indeks Pembangunan Manusia melalui perencanaan belanja urusan yang tepat sasaran mengacu pada nilai koefisien Regresi.

Kata Kunci: Belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia

A. Pendahuluan

Konsep Pembangunan Manusia, para ahli menyatakan bahwa pembangunan manusia memiliki aspek yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Menurut Amartya Sen (1999), pembangunan manusia sebagai perluasan kebebasan nyata yang dinikmati oleh manusia. Kebebasan yang dimaksud terkait faktor sosial ekonomi diantaranya akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan politik. Ahli lain berpendapat senada adalah

Mahbub ul Haq (1996) dikatakannya pembangunan manusia merupakan proses perluasan pilihan yaitu kebebasan berpolitik, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, pilihan untuk berpendidikan, bertahan hidup dan sehat, serta menikmati standar hidup layak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berhasil merumuskan konsep agenda pembangunan pasca *Milliennium Development Goals* (MDGs), yang telah berakhir pada tahun 2015 yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). Konsep SDGs merupakan kerangka pembangunan baru dengan tujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Pada tenggat waktu sampai tahun 2030, adapun tujuan dari agenda SDGs yang terkait dengan pembangunan manusia adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia, menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Di tingkat Nasional, agenda prioritas pembangunan nasional tertuang dalam Nawacita di era presiden Joko Widodo. Secara khusus, isu mengenai pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting dalam agenda pemerintahan Jokowi. Butir kelima Nawacita menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kualitas hidup manusia. Hal itu dilakukan melalui dua program, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka tahun 2020, akan meningkatkan IPM Kabupaten Bangka, dengan cara sebagai berikut:

1. Meningkatkan angka harapan sekolah, angka lama sekolah.
2. Meningkatkan layanan kesehatan anak balita, lansia serta kesehatan ibu saat melahirkan anak.
3. Meningkatkan daya beli masyarakat.

Perkembangan IPM di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 10 tahun terakhir dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut ini;

Tabel 1.1. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2010– 2019.

TAHU N	PKP	BANGK A	BLT G	BELTI M	BATEN G	BABA R	BASE L	BABE L
2010	74,6 8	66,41	66,79	64,99	65,10	63,16	59,98	66,02

2011	75,0 2	67,37	67,17	65,86	66,09	64,00	60,53	66,59
2012	75,6 9	67,99	67,87	66,59	66,88	64,92	61,17	67,21
2013	76,1 4	69,34	69,27	67,71	67,67	65,85	62,96	67,92
2014	76,2 8	69,79	69,56	68,10	68,09	66,43	66,43	68,27
2015	76,6 1	70,03	70,29	68,83	68,66	67,23	63,89	69,05
2016	76,7 3	70,43	70,81	69,30	68,76	67,60	64,57	69,55
2017	76,8 6	71,09	70,93	69,57	68,99	67,94	65,02	69,99
2018	77,4 3	71,80	71,70	70,22	69,52	68,68	65,98	70,67
2019	77,9 7	72,39	72,46	70,84	70,33	69,05	66,54	71,30

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 menunjukkan angka IPM Kabupaten Bangka dari tahun 2010–2019 mengalami peningkatan, sebesar 66,41 pada tahun 2010 meningkat 72,39 pada tahun 2019. Dengan tingkat IPM tersebut, Kabupaten Bangka tergolong kategori “baik” dalam hal pembangunan manusianya. Ditingkat Propinsi, IPM kabupaten Bangka berada pada peringkat 3 dari 7 Kabupaten/Kota. Secara rata-rata setiap tahun IPM tertinggi di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kota Pangkal Pinang sebesar 74,68 pada tahun 2010, mencapai 77,97 di tahun 2019. Sedangkan IPM terendah di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 59,98 pada tahun 2010 dan mencapai 66,54 pada tahun 2019.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka meningkatkan IPM selama 10 tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi
Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2019

Tahun	Belanja Pendidikan (Rp)	Belanja Kesehatan (Rp)	Belanja Ekonomi (Rp)	IPM
2010	80.644.823.900,00	40.041.450.014,55	16.475.421.578,00	66.41
2011	81.721.254.692,00	38.915.915.502,46	16.413.734.107,00	67.37
2012	78.676.758.356,01	56.218.033.679,31	27.022.647.831,75	67.99
2013	89.762.050.750,00	74.717.696.119,33	30.457.176.275,50	69.34
2014	77.161.691.368,40	91.029.318.543,46	50.106.807.819,00	69,79
2015	82.441.990.193,00	116.503.967.356,32	48.202.606.409,00	70,03
2016	80.643.508.457,00	135.088.073.405,62	48.401.281.045,00	70,43
2017	282.262.733.067,00	186.196.611.456,87	41.032.848.410,00	71,09

2018	295.715.719.263,05	184.703.327.527,97	43.391.278.455,00	71,80
2019	336.048.112.156,49	207.647.770.823,17	61.805.029.825,00	72,39

Sumber : BPS Kepulauan Bangka Belitung, BPPKAD Kab.Bangka (diolah)

Pada tahun 2010-2019, secara absolut realisasi belanja urusan pendidikan dan kesehatan meningkat, peningkatan sangat drastis terjadi antara tahun 2016 ke tahun 2017. Secara rinci peningkatan anggaran belanja urusan pendidikan dari tahun 2010 – 2019 sebesar Rp.255.403.288.256, peningkatan belanja urusan kesehatan sebesar Rp.167.606.320.808, peningkatan belanja urusan ekonomi sebesar Rp.45.329.608.247. Diamati dari data belanja diatas, ternyata ada perbedaan perlakuan terhadap belanja urusan ekonomi, pada periode 2010–2014 belanja urusan ekonomi mengalami peningkatan, pada periode 2015–2018 secara perlahan-lahan mengalami Penurunan. Menarik kiranya untuk diteliti dilihat perkembangan dari tiga jenis belanja urusan yang merupakan input dari peningkatan komponen angka IPM. Hasil dari perkembangan input belanja tersebut bisa dinilai dari indikator outputnya berupa angka IPM, terlihat mengalami peningkatan dari tahun 2010 – 2019 sebesar 5,98 point yaitu dari 66,41 pada tahun 2010 meningkat sebesar 72,39 pada tahun 2019. Namun peningkatan dari belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang cukup signifikan tersebut belum diimbangi dengan kenaikan nilai IPM secara signifikan.

Besaran Proporsi realisasi belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap total belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka tahun 2010-2019, disajikan lewat tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3 Proporsi Belanja Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi terhadap total belanja pada APBD Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2019

Tahun	Belanja Pendidikan (%)	Belanja Kesehatan (%)	Belanja Ekonomi (%)	Total (%)
2010	15,69	7,79	3,20	26,68
2011	15,08	7,18	3,03	25,29
2012	11,47	8,20	3,94	23,61
2013	11,55	9,61	3,91	25,07
2014	9,01	10,63	5,85	25,49
2015	8,51	12,03	4,97	25,51
2016	7,58	12,70	4,55	24,83
2017	29,15	19,23	4,23	52,61
2018	31,12	19,44	4,56	55,12
2019	30,37	18,77	5,59	54,73

Sumber : BPPKAD Kabupaten Bangka (diolah)

Selama periode sepuluh tahun terakhir (2010-2019) kesungguhan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam upaya meningkatkan pembangunan, khususnya pembangunan manusia sudah semakin baik. Jika dilihat dari proporsi alokasi belanja pendidikan dan

kesehatan sudah mencapai persentase diatas target yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sekurang-kurangnya 20 persen untuk belanja urusan pendidikan dan 10 persen untuk belanja urusan kesehatan. Tambahan lagi jika kita amati dari total proporsi ketiga belanja tersebut realisasinya sudah mencapai sebagian besar (54,73%), sisa nya hanya sebesar 45,27 untuk anggaran belanja urusan lainnya, kondisi pada tahun 2019.

Disatu sisi dilihat dari angka perkembangan persentase belanja urusan pendidikan dan kesehatan sudah melampaui target yang ditetapkan, namun belum bisa mendongkrak indikator IPM. Indikator IPM terdiri dari indikator angka harapan hidup saat lahir, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 1.4 Kondisi Indikator IPM Kabupaten Bangka tahun 2019

Indikator IPM	Satuan	Kondisi tahun 2019	Angka Maksimum
Angka Harapan Hidup Saat lahir	Tahun	70,99	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,76	18
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,23	15
Pengeluaran Per kapita	Rupiah	12.480.000	26.572.352

Sumber : BPS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

Indikator IPM tahun 2019 jika dibandingkan dengan Nilai Maksimum Indikator IPM terjadi kesenjangan yang cukup tinggi, jika dilihat per indikator kesenjangan yang tertinggi terjadi pada Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp.14.092.352, Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 14,01. Problematika yang dialami atau patut dipertanyakan adalah sejauhmana ketepatan dalam perencanaan anggaran belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga bisa secara langsung meningkatkan atau mencapai angka maksimum dari beberapa indikator terkait.

IPM merupakan data strategis, disamping sebagai ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Peneliti beranggapan sangatlah perlu dilakukan penelitian, untuk melihat bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rangka menyelaraskan antara perencanaan anggaran belanja terhadap peningkatan dan percepatan pembangunan manusia.

B. Metode

1.Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bangka, proses penelitian dijadwalkan selama 6 (enam) bulan, dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai perbaikan hasil penelitian, adapun jadwal penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti seperti pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel.3.1 Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Mart-mei	Jun-Juli	Agt-Sept	Keterangan
1.	Tahap I Penyusunan: Menyusun Proposal Seminar Proposal Perbaikan Proposal Persetujuan Proposal	V V V V			
2	Tahap II Pelaksanaan: Pengumpulan Data Analisis dan Pengolahan Data Penulisan laporan		V V V		
3	Tahap III laporan hasil: Penyampaian laporan Seminar hasil Penelitian Perbaikan hasil Penelitian			V V V	

Sumber : Diolah peneliti

2.Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif asosiatif yaitu suatu metode penelitian untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

3.Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder (time series data) yaitu data realisasi belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan dan belanja urusan ekonomi dari APBD Kabupaten Bangka, sumber data diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka. Selanjutnya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka dan Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurun waktu time series data adalah 10 tahun terakhir (tahun 2010 – 2019)

4.Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Dokumentasi; Dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan APBD kabupaten Bangka dan Publikasi Indeks Pembangunan Manusia terbitan Badan Pusat Statistik, baik yang ada di Pusat maupun Daerah serta dokumen lainnya yang terkait. Studi pustaka; teori-teori, pendapat-pendapat, serta penelitian terdahulu yang relevan melalui buku-buku dipergustakaan maupun internet.

5. Populasi dan Sampel

Populasi; untuk variabel X_1, X_2, X_3 adalah data realisasi belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang tersaji lewat Laporan Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka setiap tahun. Sampel dipilih secara purposive sampling dalam penelitian ini dari tahun 2010 – 2019. Populasi; untuk variabel Y adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka yang terdapat dalam Buku Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterbitkan setiap tahun. Sampel dipilih secara purposive sampling dari tahun 2010 – 2019.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS.22 dan Analisis data menggunakan model regresi berganda, series data tahun 2010 - 2019. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut; analisis deskriptif, pengujian kelayakan model dengan uji asumsi klasik (Uji normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinieritas), uji signifikansi hipotesis; secara parsial (uji t) dan secara simultan (uji F). Dilanjutkan dengan Analisis Koefisien Determinasi dan Analisis Estimasi Persamaan Regresi linier Berganda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil penelitian

Uji Normalitas

Hasil olah data SPSS 22, menunjukkan nilai Probabilitas (Sig) > nilai alpha 5 % = 0,200 > 0,05. Hal ini bermakna data yang dianalisis dalam penelitian ini relatif sama dengan nilai rata-rata, sehingga dapat dikatakan data yang diteliti berdistribusi normal dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi. Menurut Ghazali (2012: 164), distribusi dikatakan normal, melihat angka probabilitas (Sig) dengan ketentuan jika Probabilitas (Sig) > 0,05, maka data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gujarati (2004) salah satu cara pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan olah data SPSS 22, menunjukkan semua variabel bebas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, karena nilai $t_{hit} < t_{tabel}$ ($t_{tabel} = 2,447$). Begitu juga nilai Signifikannya semua variabel diatas 0,05 (Sig > 0,05), kesimpulannya adalah data tersebut bersifat homoskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2013), jika matrik korelasi tidak ada nilai > 0,90 maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model. Dilihat dari hasil olah data SPSS 22, ternyata model regresi

tidak mengalami gangguan multikolinearitas, karena nilai korelasi masing-masing variabel bebas $< 0,90$. Dengan demikian disimpulkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini layak digunakan.

Uji Outokorelasi

Dalam penelitian ini uji outokorelasi dilihat dari hasil nilai Uji Durbin Watson (DW). Dari hasil olah data dengan SPSS versi 22, nilai DW sebesar 1,912 ada diantara nilai; $-2 \leq DW \leq 2$ sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi (Anderson, 2001:733).

Pengujian Hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali, Imam (2016: 98), uji parsial (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Dilihat dari nilai Signifikan (Sig), hasil olah data SPSS 22 dapat diputuskan; Variabel X_1 = nilai Sig $> 0,05 = 0,930 > 0,05$ (tidak signifikan), Variabel X_2 = nilai Sig $> 0,05 = 0,105 > 0,05$ (tidak signifikan), Variabel X_3 = nilai Sig $> 0,05 = 0,163 > 0,05$ (tidak signifikan). Berdasarkan keputusan diatas dan dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel, semua variabel koefisien regresinya bertanda positif, maka disimpulkan bahwa;

1. Belanja urusan pendidikan berpengaruh positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia,
2. Belanja urusan kesehatan berpengaruh positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia,
3. Belanja urusan ekonomi berpengaruh positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengujian Hipotesis dengan Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali, Imam (2016: 98) uji simultan (Uji F) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model regresi mampu menjelaskan secara bersama-sama terhadap variabel dependen Kriteria yang digunakan membandingkan hasil F_{uji} (ouput SPSS) dengan F_{tabel} , $F_{uji} \leq F_{tabel} = \text{terima } H_0$ dan $F_{uji} > F_{tabel} = \text{tolak } H_0$. Hasil penghitungan uji simultan atau uji F diperoleh nilai $F_{hitung} = 38,334$ sedangkan nilai kritis F_{tabel} dengan derajat bebas pembilang 3 dan penyebut 6 pada $\alpha (0,05) = 4,76$. Dengan demikian $F_{hitung} (38,334) > F_{tabel} (4,76)$, keputusannya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi kesimpulannya; belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Bangka. Hal ini juga diperkuat dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai alphanya ($0,000 < 0,05$).

Hasil Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali, Imam (2016: 98) Koefisien Determinasi (R Square) digunakan untuk mengetahui kemampuan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil olah data dengan SPSS 22, nilai Adjusted R Square = 0,926 menunjukkan besaran pengaruh dari belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap IPM sebesar 92,6 persen dan selebihnya $(100\% - 92,6\%) = 7,4$ persen dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

Hasil estimasi Pengaruh belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengolahan data melalui SPSS.22, terkait Persamaan regresi berganda dan estimasinya, dapat diketahui persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah: $Y = 65,692 + 0,000 X_1 + 0,022 X_2 + 0,042 X_3$, koefisien regresi variabel X_1 (belanja urusan pendidikan), variabel X_2 (belanja urusan kesehatan), dan variabel X_3 (belanja urusan ekonomi) secara keseluruhan bernilai positif artinya bahwa pengaruh ketiga variabel ini searah dengan variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bangka. Dengan kata lain jika terjadi peningkatan 1 (satu) milyar rupiah terhadap masing-masing realisasi anggaran belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan dan belanja urusan ekonomi maka nilai IPM akan diprediksi terjadi peningkatan sebesar 0,000 poin (variabel X_1), 0,022 poin (variabel X_2), dan 0,024 poin (variabel X_3).

2. Pembahasan

Analisis Pengaruh belanja urusan pendidikan terhadap IPM

Dari hasil pengolahan dan analisis data serta uji signifikansi pengaruh variabel secara parsial, menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan berpengaruh positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti berpendapat penyebab belum signifikannya pengaruh belanja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka, disamping faktor minimnya besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga terkendala proporsi belanja urusan pendidikan yang belum mencapai batas minimal 20 persen pada tahun 2010 – 2016. Proporsi belanja urusan pendidikan mencapai diatas target 20 persen baru nampak pada tiga tahun terakhir (2017 – 2019), kita ketahui bahwa investasi di bidang urusan pendidikan berdampak pada waktu lama (jangka panjang). Upaya pemerintah Kabupaten Bangka dalam hal memajukan sektor pendidikan, sudah sangat memuaskan jika dilihat dari persentase realisasi belanja urusan pendidikan yang sudah diatas angka minimal 20 persen dari APBD. Pada tahun 2019 realisasi belanja urusan pendidikan sebesar Rp. 336.048.112.156,49 atau 30,37% dari total realisasi belanja APBD kabupaten Bangka. Namun belum bisa

mendongkrak angka indikator rata-rata lama sekolah di kabupaten Bangka yang saat ini masih berada pada level 8,23 tahun dan masih jauh dari angka ideal atau angka maksimum yakni sebesar 15 tahun.

Menurut Meier dan Rauch (2000: 216), mengatakan pendidikan yang disebut sebagai modal manusia yang akan berkontribusi terhadap pembangunan. Hal ini disebabkan pendidikan yang lebih tinggi akan mampu merespon inovasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Kumar dalam Setyopurwanto (2013:5) modal manusia tergantung dengan ketrampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman, guna memproduksi barang dan jasa serta pengembangan pengetahuan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sal Diba Susen Pake (2018) yang menyatakan variabel pendidikan berpengaruh positif, namun kurang berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2007-2016. Selanjutnya Nur Azizah, Indraswati TA Rievane, Sultan Suhab (2016) dengan judul Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2014, pengeluaran pemerintah urusan pendidikan berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap IPM. Penelitian yang dilakukan Ulfa Chaerunnisa dan Sunardi Awari (2014) yang menyatakan pengaruh variabel belanja pendidikan tidak signifikan terhadap IPM di Propinsi Sulawesi Selatan, begitu juga hasil penelitian Muliza, T.Zulham, Chenny Septaria (2017) yang menyatakan Belanja pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota provinsi Aceh. Penelitian Analisis pengaruh sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap nilai IPM dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah oleh Sigit Wibowo (2016) yang menyatakan belanja sektor pendidikan tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan nilai IPM.

Kaitan dengan penelitian lain yang berbeda hasil penelitiannya, diantaranya; yang dilakukan oleh Kartika (2017) yang menyatakan variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Jenepono periode 2005-2014. Zul Putra, S (2017) terkait Analisis belanja pemerintah terhadap IPM di Kabupaten Luwu tahun 2010-2014 dengan metode Regresi linier berganda, menyatakan variabel belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Luwu, sementara variabel belanja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Luwu.

Analisis Pengaruh belanja urusan kesehatan terhadap IPM

Dari hasil pengolahan dan analisis data serta uji signifikansi pengaruh variabel secara parsial, menunjukkan bahwa belanja urusan kesehatan berkorelasi positif, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti

berpendapat penyebab belum signifikannya pengaruh belanja urusan kesehatan di Kabupaten Bangka, disamping keterbatasan anggaran belanja urusan kesehatan juga oleh faktor belum terfokusnya pada aspek pencegahan. Hal ini bisa kita lihat dari perkembangan selama 10 tahun terakhir terkait peningkatan indikator umur harapan hidup saat lahir sekitar 0,71 tahun, yakni dari 70,28 tahun ke 70,99 tahun dan masih jauh ketinggalan dengan angka ideal atau angka maksimum sebesar 85 tahun. Lambatnya peningkatan indikator dari dimensi kesehatan ini berakibat pada kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangka.

Menurut Rostow, pada tingkat ekonomi lanjut aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana menuju ke pengeluaran aktivitas sosial terkait program kesejahteraan hari tua, pendidikan, pelayanan kesehatan masyarakat dan lainnya (Dumairy, 1997: 163). Manfaat intrinsik dari pendidikan dan kesehatan yang baik adalah akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup, sedangkan manfaat instrumental dari pendidikan dan kesehatan adalah membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Lanjouw dkk, 2001).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Muliza, T.Zulham, Chenny Septaria (2016) yang menyatakan belanja kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten/Kota provinsi Aceh, penelitian Febri Aquariansyah (2018) menyatakan belanja pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016. Penelitian Analisis pengaruh sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap nilai IPM dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah oleh Sigit Wibowo (2016) yang menyatakan belanja sektor kesehatan tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan nilai IPM.

Beberapa peneliti terdahulu yang berbeda dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Kartika (2017) yang menyatakan variabel belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Jenepono periode 2005-2014. Selanjutnya Zul Putra, S (2017) meneliti tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM di Kabupaten Luwu tahun 2010-2014 dengan metode Regresi linier berganda, menyatakan variabel belanja kesehatan berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Luwu. Perbedaan dengan peneliti lain yaitu dengan Nur Azizah, Indraswati TA Rievane, Sultan Suhab (2016) meneliti terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2014. Hasil penelitiannya menyatakan pengeluaran pemerintah urusan kesehatan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil yang berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan Ulfa Chaerunnisa dan Sunardi

Awari (2014) yang menyatakan pengaruh variabel belanja pendidikan dan belanja ekonomi tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan di Propinsi Sulawesi Selatan.

Analisis Pengaruh belanja urusan ekonomi terhadap IPM

Dari hasil pengolahan dan analisis data serta uji signifikansi pengaruh variabel secara parsial, menunjukkan bahwa belanja urusan ekonomi berpengaruh positif, namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti berpendapat penyebab belum signifikannya pengaruh belanja urusan ekonomi di Kabupaten Bangka, disamping keterbatasan anggaran belanja urusan ekonomi, juga porsi yang sangat minim yang hanya mencapai kisaran 3,20 - 5,59 persen selama 10 tahun terakhir. Faktor lain karena belum terfokusnya belanja urusan ekonomi pada aspek peningkatan indikator pengeluaran perkapita atau daya beli masyarakat. Selama 10 tahun terakhir data perkembangan pengeluaran per kapita menunjukkan lambatnya perkembangan dari dimensi standar hidup layak, yakni dari Rp. 9.583.000 (tahun 2010) meningkat ke Rp.12.480.000, namun masih jauh dari angka ideal atau angka maksimum yakni sebesar Rp.26.572.352. Sehingga hal ini kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bangka.

Teori Kuznet yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya output perkapita (Todaro, 2008). Pertumbuhan output yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Tingginya pertumbuhan output akan menyebabkan pola konsumsi di masyarakat akan meningkat, selanjutnya akan meningkatkan daya beli masyarakat atau meningkatkan indikator pengeluaran perkapita masyarakat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu, antara lain penelitian Nur Azizah, Indraswati TA Rievane, Sultan Suhab (2016) yang meneliti tentang Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten pesisir Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2014. Menunjukkan pengeluaran pemerintah urusan ekonomi secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Ulfa Chaerunnisa dan Sunardi Awari (2014) yang menyatakan pengaruh variabel belanja ekonomi tidak signifikan terhadap IPM di Propinsi Sulawesi Selatan.

Perbedaan hasil dengan peneliti terdahulu, penelitian oleh Kartika (2017) yang menyatakan variabel ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten

Jeneponto periode 2005-2014. Zul Putra, S (2017) menyatakan belanja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Luwu tahun 2010 – 2014.

Analisis Pengaruh belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dari hasil pengolahan dan analisis data serta uji signifikansi pengaruh variabel secara simultan, menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka. Besarnya pengaruh belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 92,6 persen dan sisanya sebesar 7,4 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

Persamaan regresi berganda: $Y = 65,692 + 0.000 X_1 + 0.022 X_2 + 0,042X_3$, dilihat dari nilai koefisien regresi dari tiga variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) ternyata koefisien regresi variabel X_3 (belanja urusan ekonomi) yang tertinggi yaitu sebesar 0,042, menyusul variabel koefisien regresi X_2 (belanja urusan kesehatan) sebesar 0,022, dan koefisien regresi variabel X_1 (belanja urusan pendidikan) yang terkecil yaitu sebesar 0,000. Secara keseluruhan koefisien regresinya bernilai positif artinya bahwa pengaruh atau hubungan ketiga variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) ini searah dengan variabel tak bebasnya (Y) di Kabupaten Bangka. Dengan kata lain jika terjadi peningkatan 1 (satu) milyar rupiah terhadap masing-masing realisasi anggaran belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan dan belanja urusan ekonomi maka nilai IPM akan diprediksi terjadi peningkatan sebesar 0,000 poin (variabel X_1), 0,022 poin (variabel X_2), dan 0,024 poin (variabel X_3). Makna perbedaan besaran koefisien regresi dari hasil penelitian ini, bisa dimanfaatkan guna memprediksi perencanaan anggaran belanja urusan mana yang lebih berdampak terhadap peningkatan angka IPM pada tahun berikutnya.

Usaha pemerintah kabupaten Bangka dalam hal memajukan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi, cukup memuaskan jika dilihat dari total realisasinya sudah mencapai Rp. 605.500.912.804,66 atau 54,73 persen dari total realisasi pengeluaran APBD Kabupaten Bangka pada tahun 2019.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan;

1. Secara Parsial; belanja urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan dan belanja urusan ekonomi masing-masing berpengaruh positif, namun pengaruhnya tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka. Tidak signifikannya pengaruh belanja

urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan dan belanja urusan ekonomi terhadap perubahan angka IPM di Kabupaten Bangka, disebabkan kesenjangan antara indikator harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, indikator umur harapan hidup saat lahir dan indikator pengeluaran perkapita kondisi saat ini dengan Indikator idealnya (indikator maksimum) masih sangat tinggi.

2. Secara Simultan; belanja urusan pendidikan, kesehatan dan ekonomi bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka. Besaran pengaruhnya = 0,926 atau 92,6 persen, sisanya 7,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.
3. Persamaan regresi berganda, $Y=65,692 + 0.000 X_1 + 0.022 X_2 + 0,042 X_3$, koefisien regresi belanja urusan pendidikan = 0,000, koefisien regresi belanja urusan kesehatan = 0,022, koefisien regresi belanja urusan ekonomi = 0,042.

2. Saran

Bagi pemerintah kabupaten khususnya pemerintah kabupaten Bangka Dalam pengalokasian belanja urusan pendidikan disarankan lebih memfokuskan pemberian beasiswa (kurang mampu/berprestasi) baik kepada siswa, mahasiswa maupun para pendidik termasuk guru dan dosen, dalam rangka meningkatkan indikator Harapan Lama Sekolah dan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah. Pengalokasian belanja urusan kesehatan disarankan fokus Program/kegiatan yang bersifat pencegahan (preventif) guna meningkatkan indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir. Dan memberikan alokasi yang lebih besar pada belanja urusan ekonomi, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta peningkatan pemberdayaan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat, secara langsung akan meningkatkan indikator pengeluaran perkapita, sehingga akan meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangka.

Bagi Peneliti selanjutnya, dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel lainnya serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat, sehingga mendapatkan hasil temuan yang lebih mendekati fakta sesungguhnya.

E. Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, 2014, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*, Jakarta, BPS.

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019, *IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2018*, Pangkalpinang, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dumairy, (1997), *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga.

Ghozali, Imam, 2012, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS*, Yogyakarta, Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.2 Edisi 7*, Yogyakarta, Universitas Diponegoro.

Gujarati, 2004, *Basic Econometric*, New York, Mc Graw-Hill.

Haq, M.U, 1996, *Reflection on Human Development, 1st edition*, New York, Oxford University Press.

Meier, G.M dan Rauch, J.E, 2000, *Leading Issue in Economics Development, 7th edition*, New York, Oxford University Press.

Rostow dan Musgrave, 1996, *Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Perencanaan Pembangunan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pustaka.

Santoso, S. 2002, *Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Jakarta, Elexmedia Komputindo.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabet.

Sen, A, 1999, *Development as Freedom 1st ed*, New York, Oxford University Press.

UNDP, 1990, *Human Development Report*, New York, UNDP.

UNDP, 2004, *Human Development Report*, New York, UNDP.

UNDP, 2010, *Human Development Report*, New York, UNDP.

Azizah N, Indraswati, Rievane dan Suhab S, 2016, *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2010-2014*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin, Makasar.

Aquariansyah Febri, 2018, *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung tahun 2010-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bastias Dwi, Desi, 2010, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Rajawali Press, Jakarta.

Farismadha. SS, 2019, *Pengaruh pengeluaran belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemda se-Jawa periode 2015-2017*, IAIN Surakarta.

Muliza, T.Zulham, Chenny Seftaria, 2017, *Pengaruh Belanja Pemerintah sektor Pendidikan, sektor Kesehatan, tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tahun 2010-2014*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.3 No.1, Maret 2017 ISSN:2502-6976

Putra Zul, 2017, *Analisis Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu tahun 2010-2014*, *Jurnal Riset Edisi XIV vol 3 no.003 2017 UNIBOS*, Makassar

Setyo Purwanto, Didi, 2013, *Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Modal terhadap pendapatan perkapita Masyarakat Indonesia*, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Brawijaya.

Situmorang, Armin Thurman, 2007, *Analisis Investasi Dalam Human Capital dan Akumulasi Modal Terhadap Peningkatan Produk Domestik*, Universitas Sumatera Utara.

Tri Haryanto, Unggul H dan Achmad Solihin, 2005, *Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja sektor Pendidikan serta Kesehatan di Jawa Timur*, *Majalah Ekonomi*, Tahun XIV No.2, 2 Agustus 2005, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.

Wahid A, Bilal, 2012, *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.

Wibowo S, 2016, *Analisis pengaruh sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap nilai IPM dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2013-2015*, Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Republik Indonesia, Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Tentang alokasi belanja urusan kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Peraturan Gubernur tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Kabupaten Bangka, Peraturan Bupati tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka